

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN II 2026

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
Jalan PANCASILA NOMOR 12 KOTA GUNUNGSITOLI-22814.
HTTPS://pn-gunungsitoli.go.id
info@pn-gunungsitoli.go.id

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
Jln. Pancasila No. 12 Gunung Sitoli – 22814 Telepon : (0639) 21344 –Fax (0639/21343)
Email : info@Gunung Sitoli.go.id, Website :www.pn-Gunung Sitoli.go.id

Nomor : W2-U12/1308/KPN.W2-U12/PW1.2.1/VII/2026 Gunungsitoli, 21 Juli 2026
Lampiran : 1 (Dokumen)
Perihal : Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
Periode April s/d Juni 2026

Kepada Yth. Bapak Direktur Jendral Badan Peradilan Umum
Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jln. Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan secara rutin per-tiga bulan sekali di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB, dengan ini kami mengirimkan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Periode April s/d Juni 2026 (data terlampir).

Demikian data ini kami kirimkan sebagai laporan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB

Zulfadly, S.H., M.H
NIP. 19760906 200112 1 002

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
3. Arsip (Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB)

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN II

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
KELAS IB

TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI KELAS I B

Disahkan di Gunung Sitoli
21 Juli 2026

Top Management,

Zulfadly, S.H., M.H
NIP. 19760906 200112 1 002

Sekretaris Tim Survei,

Alius Lase, S.H.
NIP. 19850813 200904 1 004

Ketua Tim Survei,

Roberto Sianturi, S.H.
NIP. 19940606 201712 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB triwulan II tahun 2026 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan survei persepsi korupsi kepada pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB. Dalam survei ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui Aplikasi Sisuper. Survei dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja tim survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB mempunyai komitmen dan tekad yang kuat dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud wilayah bersih dari korupsi.

Demikianlah laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB Triwulan II tahun 2026 ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Gunungsitoli, 21 Juli 2026

Tim Survei

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Landasan Hukum 2
1.4. Rencana Kerja 2

BAB II METODOLOGI 4
2.1. Metode Penelitian 4
2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis 4
2.3. Teknik Survei 4
2.4. Teknik Analisis Data 4
2.5. Pelaksanaan Kerja 5

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI 7
3.1. Profil Responden 7
3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator 9
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB 18
3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB 19

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 21
4.1. Kesimpulan 21
4.2. Rekomendasi 21

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a) Penetapan Pelaksana dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimilikinya.

b) Penyiapan sarana dan prasarana pengisian survei elektronik seperti komputer sehingga mempermudah masyarakat pengguna produk layanan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

c) Penyusunan Jadwal, penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Kerja

Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB ini dilaksanakan pada Minggu pertama sampai Minggu ke tiga bulan Juli 2026. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini:

Tabel 1
Jadwal Pelaksanaan Kerja

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	01 Juli s/d 03 Juli 2026
2	Pengumpulan Data / Survei SKM	06 Juli s/d 08 Juli 2026
3	Pengolahan Data	09 Juli s/d 13 Juli 2026
4	Penyusunan dan Pelaporan	14 Juli s/d 20 Juli 2026

1.4.3. Metode Survei

Metode survei dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang bernama SISUPER. Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum yang digunakan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi anti Korupsi dan Survei Harian.

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metodologi Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deksripsi kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB.

2.3. Teknik Survei

Teknik survei yang dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat link http://esurvei.badilum.mahkamahagung.go.id dan link yang digunakan responden yaitu http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098696.

2.4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB ini digunakan teknik analisis data kuantitatif.

2.5. Pelaksanaan Kerja

Pengukuran/Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB ini dilaksanakan pada 01 Juli 2026. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini:

Gambar 1

Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas



Tabel 2 Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Data
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25-43.75	1	**Tidak bersih dari korupsi**
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	**Kurang bersih dari korupsi**
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	**Cukup bersih dari korupsi**
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	**Bersih dari Korupsi**

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB mayoritas memiliki pendidikan S1 sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) responden.

Tabel 4 Tingkat Pendidikan

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	Tidak/Belum Sekolah	0
2	SD	1
3	SMP/ SLTP	1
4	SMA / SMU	9
5	D1	0
6	D2	0
7	D3	1
8	S1	27
9	S2	1
10	S3	0
Jumlah		**40**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebagian besar responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB memiliki pekerjaan dalam kategori lainnya sebanyak 19 (Sembilan Belas) responden.

Tabel 5 Jenis Pekerjaan Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	PNS	5
2	TNI	0
3	POLRI	3
4	WIRASWASTA	10
5	WIRAUSAHA	3
6	TENAGA KONTRAK	0
6	LAINNYA	19
Jumlah		**40**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun - 39 tahun. Bagi kelompok usia 18-28 tahun jumlah responden semakin sedikit, demikian pula kelompok usia 50 tahun – 59 tahun dan terakhir responden pada kelompok usia responden 60 tahun – 69 tahun.

Tabel 6 Usia Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persen
1	18 Tahun s/d 28 Tahun	13 orang	32,50 %
2	29 Tahun s/d 39 Tahun	18 orang	45,00 %
3	40 Tahun s/d 49 Tahun	1 orang	2,50 %
4	50 Tahun s/d 59 Tahun	5 orang	12,50 %
5	60 Tahun s/d 69 Tahun	3 orang	7,50 %
Jumlah		**40 orang**	**100%**

3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

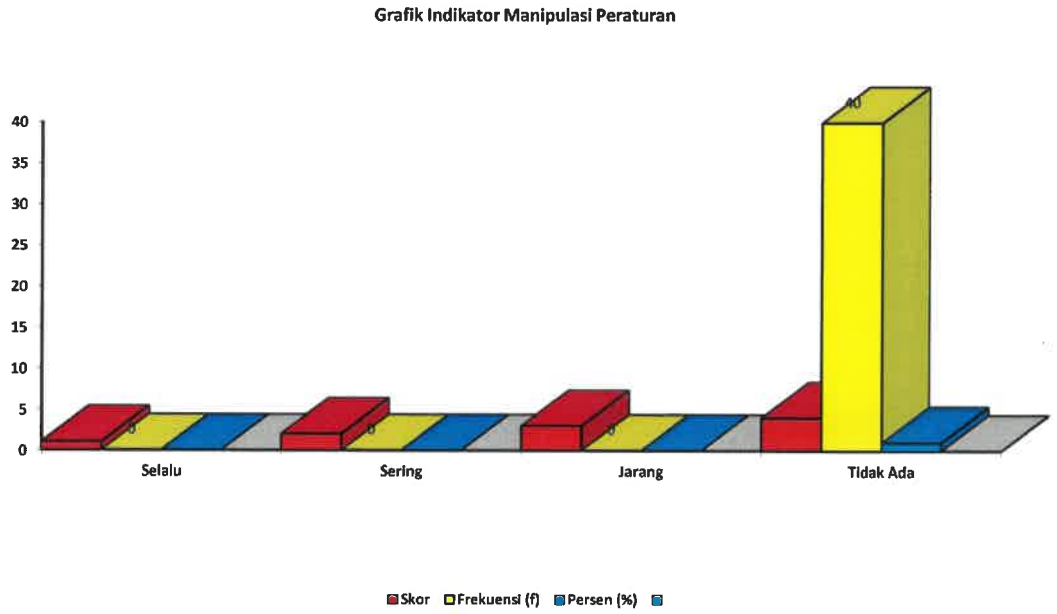
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan/Prosedur

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil index 4,000. Melalui nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 7 Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0 %
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak Ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

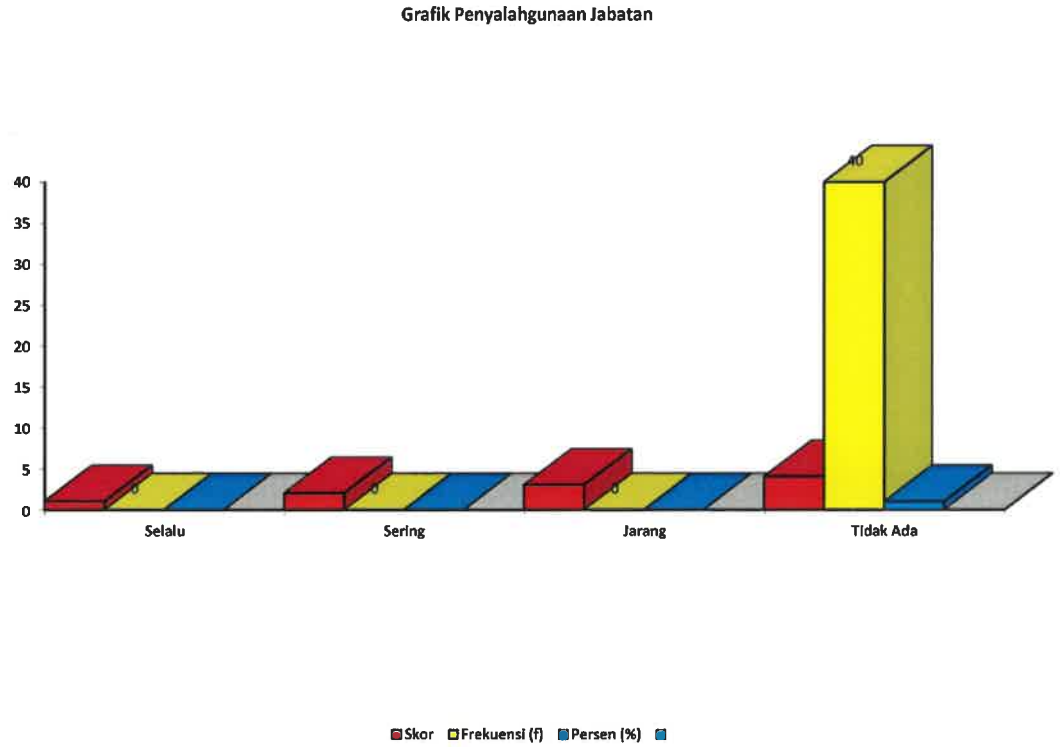
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil index 4,000. Dari nilai indeks dapat diartikan bahwa

kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 8 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



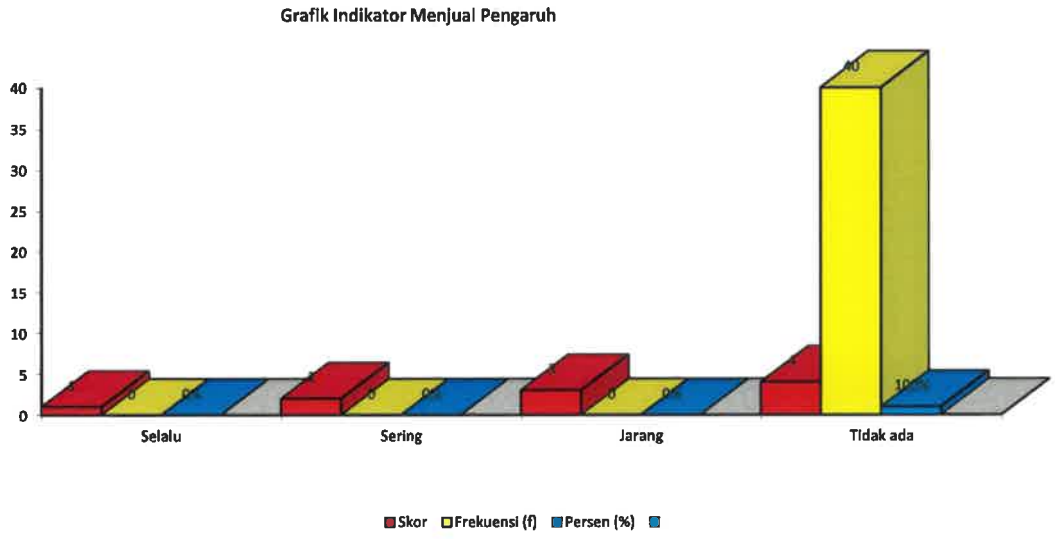
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkanhasilindex 4,000. Dengan hasil indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 9 Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil index 4,000. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 10 Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

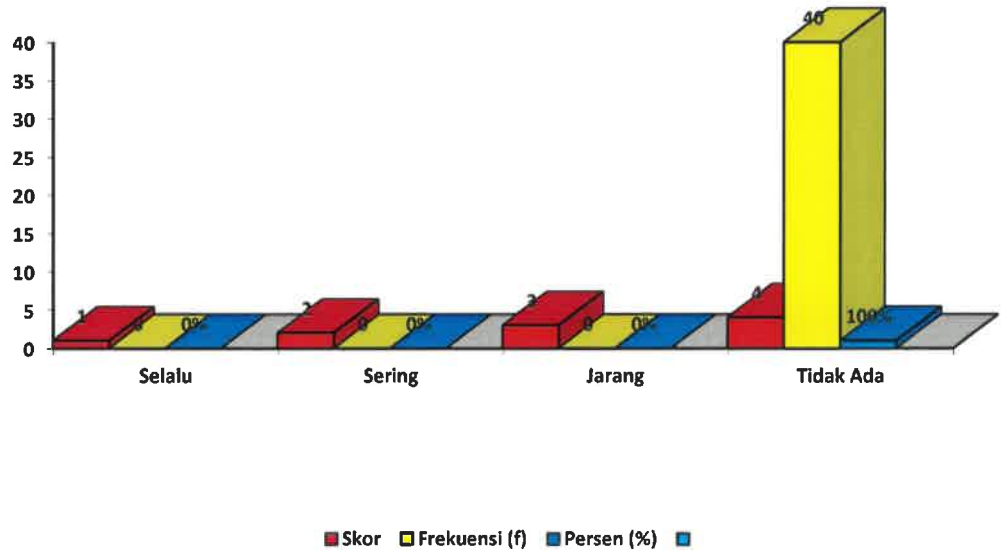
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil index 4,000. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 11 Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Biaya Tambahan



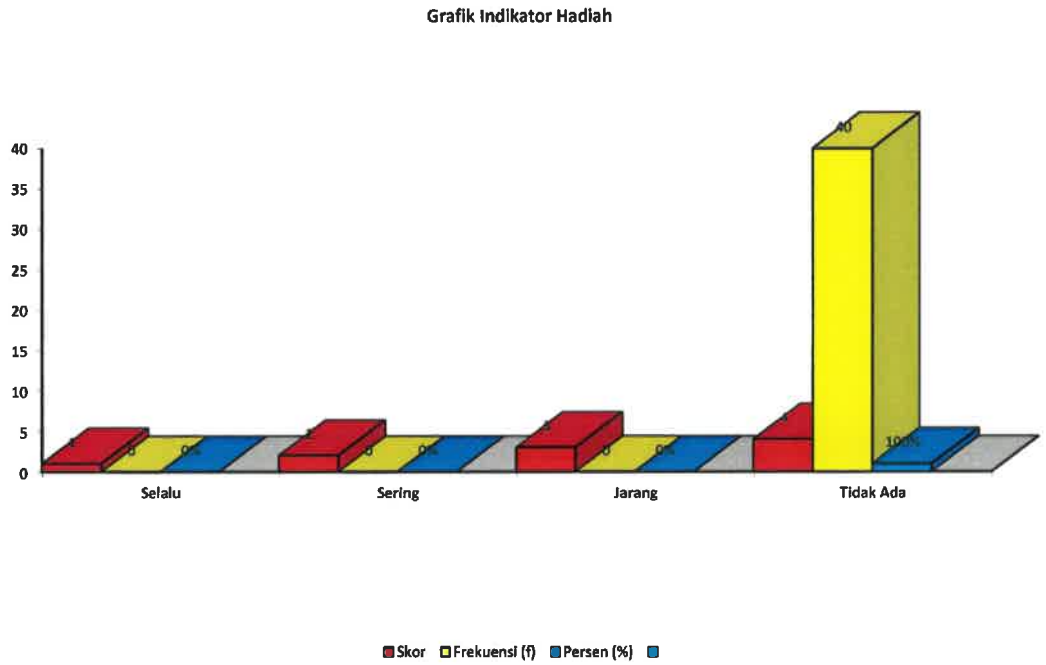
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Dengan nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 12 Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



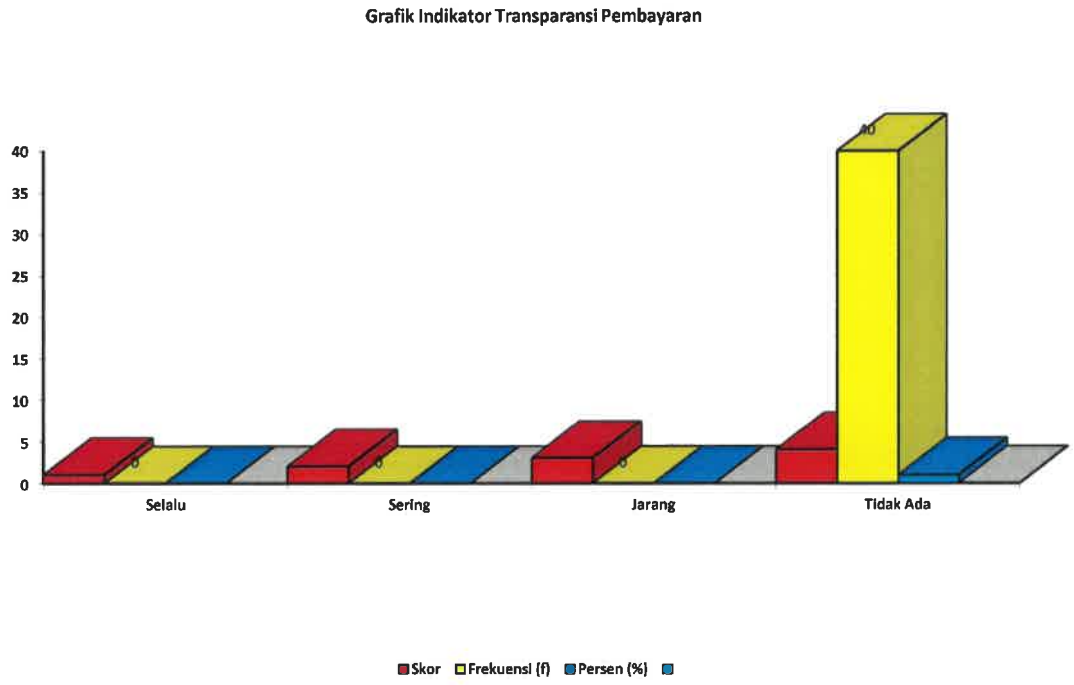
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 13 Indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



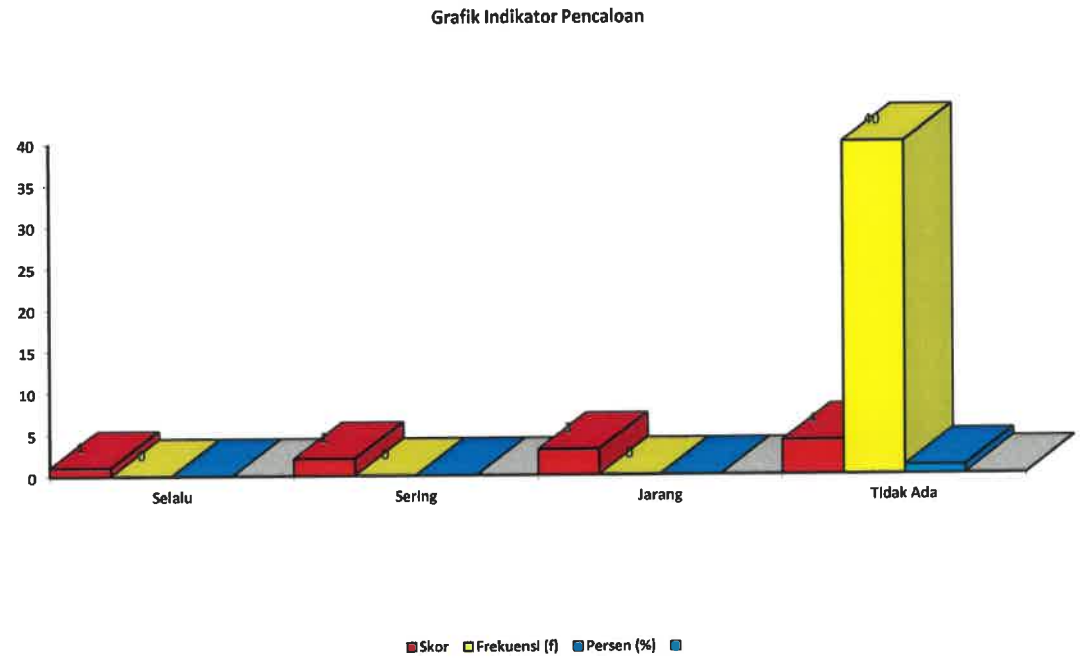
3.2.8. Indikator Pencaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 14 Indikator Pencaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



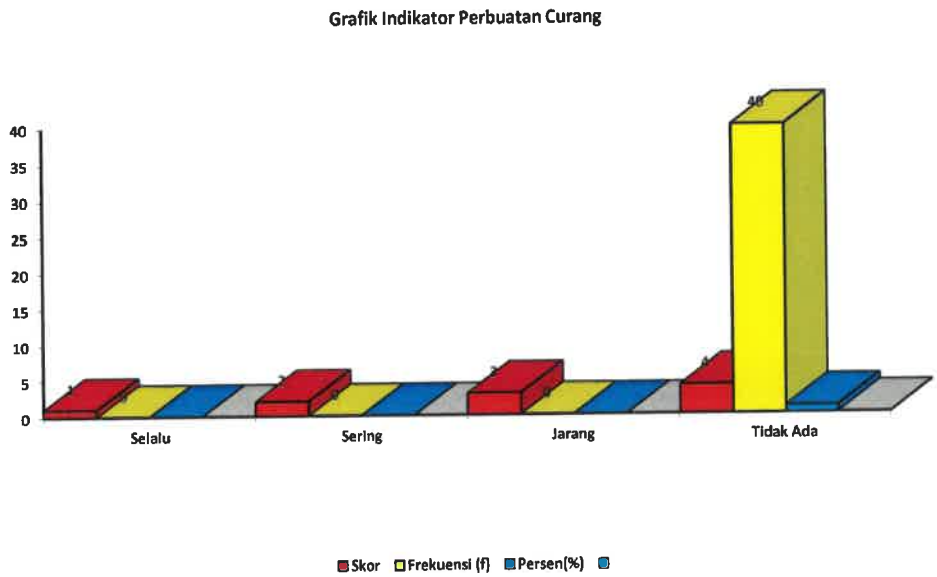
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Nilai Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 15 Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

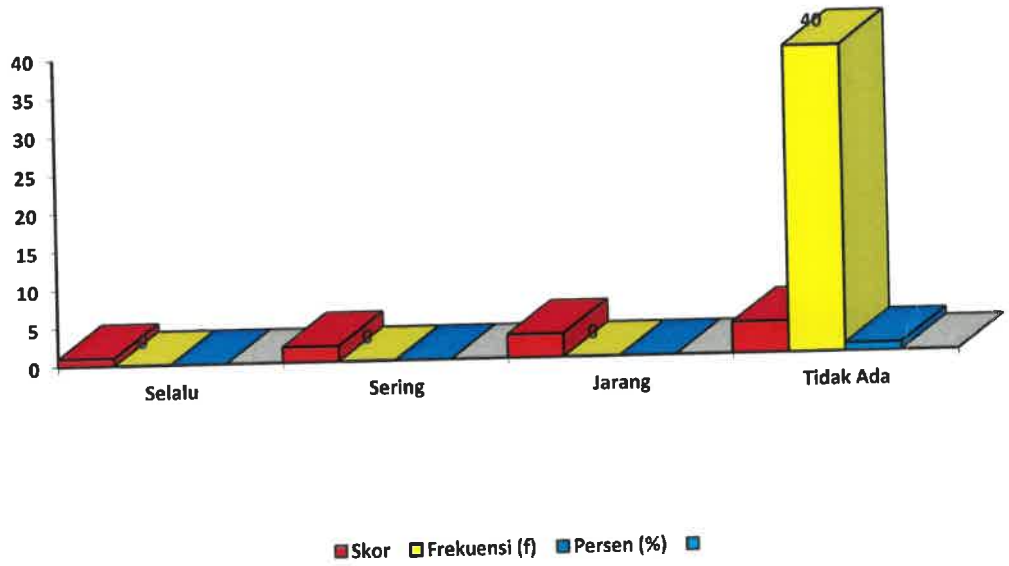
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil index 4,000. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 16 Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Transaksi Rahasia



3. 3 . Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB sebesar **4,00** dengan persentase **100 %** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di

bawah ini, maka skor Indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**.

Tabel 17 Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL (SPAK)	MUTU	KINERJA
1	1.00-1.75	25 -43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 -62.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga mejaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang sudah memadai dan terarah untuk dipertahankan;
2. Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan bekerja berdasarkan aturan;
3. Transparansi Biaya sebaiknya lebih dipublikasi;
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dipertahankan agar tidak ada hubungan langsung antara Pegawai dan Pencari Keadilan;
5. Memperbaharui daftar panjar biaya perkara sesuai dengan kondisi saat ini.

Tabel Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

No.	Uraian	Nilai						
		Bersih	Cukup Bersih	Kurang Bersih	Tidak Bersih	Nilai Rata-Rata per Ruang Lingkup	NRR Tertimbang (NRR per RL X 1/10)	Kinerja
		4	3	2	1			
1	**Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?**	39	0	0	0	**4,000**	0,400	Bersih
2	**Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyelahguanaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?**	39	0	0	0	**4,000**	0,400	Bersih
3	**Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/ berkas perkara?**	39	0	0	0	**4,000**	0,400	Bersih
4	**Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?**	39	0	0	0	**4,000**	0,400	Bersih
5	**Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?**	39	0	0	0	**4,000**	0,400	Bersih
6	**Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?**	39	0	0	0	**4,000**	0,400	Bersih
7	**Apakah menerima bukti transaksi keuangan/ pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Peengadilan dilakukan? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya/ PNBP)**	39	0	0	0	**4,000**	0,400	Bersih
8	**Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?**	39	0	0	0	**4,000**	0,400	Bersih
9	**Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?**	39	0	0	0	**4,000**	0,400	Bersih
10	**Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/ Panitera/ Staff Pengadilan di luar persidangan?**	39	0	0	0	**4,000**	0,400	Bersih
Rata-rata Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi							4,00	Bersih

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sebesar **4,00** dengan presentase sebesar **100%**

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB memiliki Indeks Persepsi Korupsi **4,00 atau 100%** masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

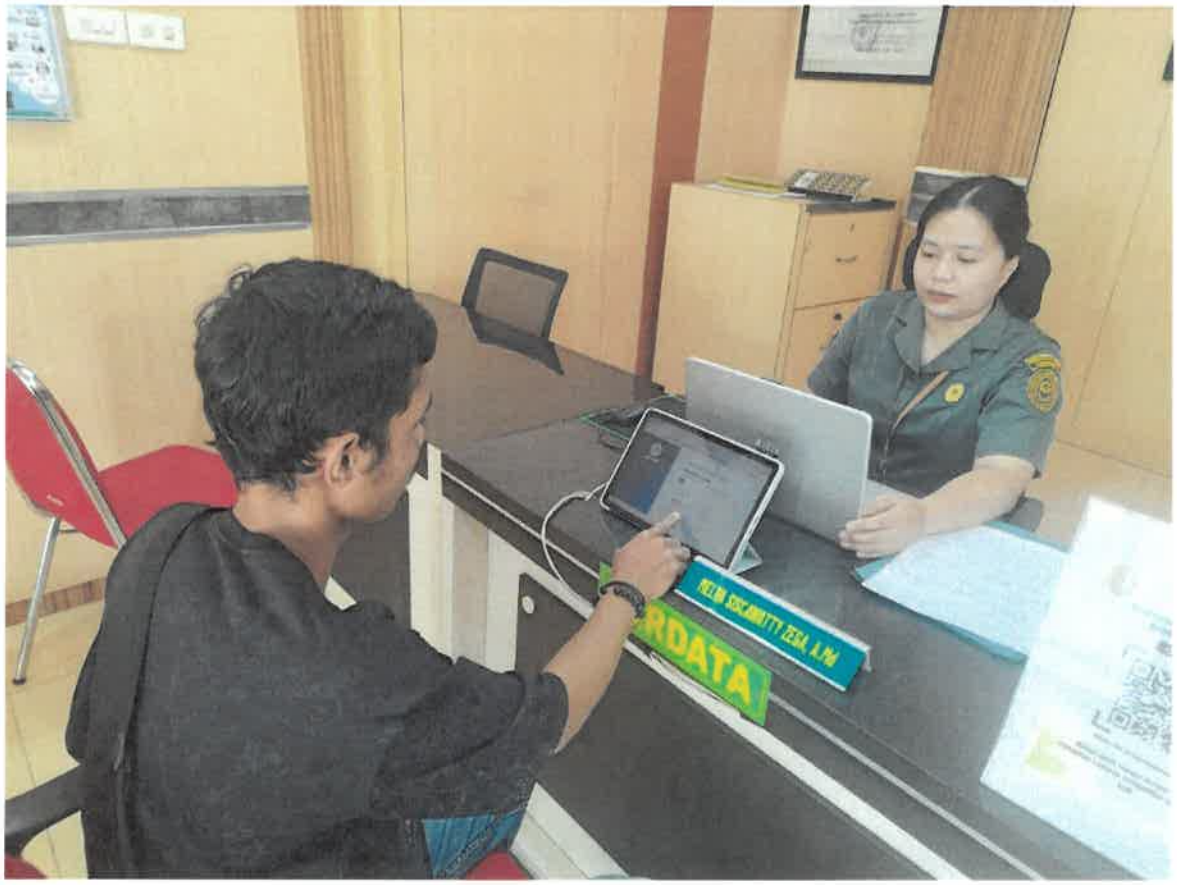
1. Indikator Manipulasi Peraturan/Prosedur, mendapat Indeks 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Pencaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

4.2 Saran

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tahun 2026, menunjukkan **bahwa 3 unsur tertinggi terletak pada indikator Penyalahgunaan Jabatan, Menjual Pengaruh, Transparansi Biaya,** dan **3 unsur terendah terletak pada indikator Transparansi Pembayaran, Pencaloan, Perbuatan Curang.** Memiliki nilai indeks paling rendah diantara indikator lainnya, karena itu perlu dievaluasi lagi.

LAMPIRAN

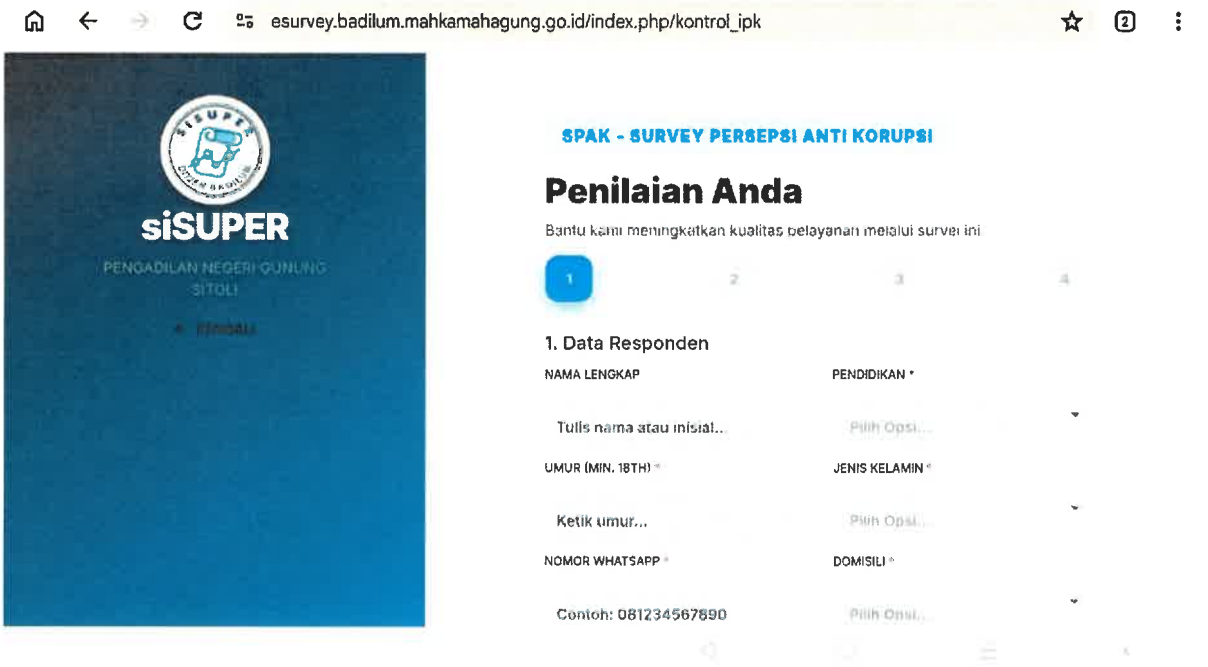
EVIDENCE PENGISIAN SURVEY PADA APLIKASI SI SUPER





TAMPILAN APLIKASI SISUPER





HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II PADA APLIKASI SISUPER

